

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun; 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

ARYAWAN 1. Nama

KEPALA DINAS 2. Jabatan

NHK 835703

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

838.100.000

Tanah Seluas 832 m2 di BARITO SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.885.000

Tanah Seluas 645 m2 di BARITO SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.

3. Tanah Seluas 756 m2 di BARITO SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 29.800.000

Tanah Seluas 216 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

647.000.000

MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT CKD Tahun 2022. HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	- NE - 17
D. SURAT BERHARGA	Rp.	K K
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	805.930.457
F. HARTA LAINNYA	Rp.	MONTH MAN
Sub Total	Rp.	2.291.030.457
III. HUTANG	Rp.	-
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.291.030.457





^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{2.} Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

^{3.} Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

: MURTADHO BISHRI, S.SIT 1. Nama

: KEPALA BIDANG 2. Jabatan

3. NHK : 626411

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 1.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/90 m2 di KOTA PALANGKA

RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 1146 m2/352 m2 di KOTA

PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 47.000.000

MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000

MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000

MOBIL, TOYOTA LGX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.

40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS 45.000.000 Rp.

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total 1.092.000.000 Rp.

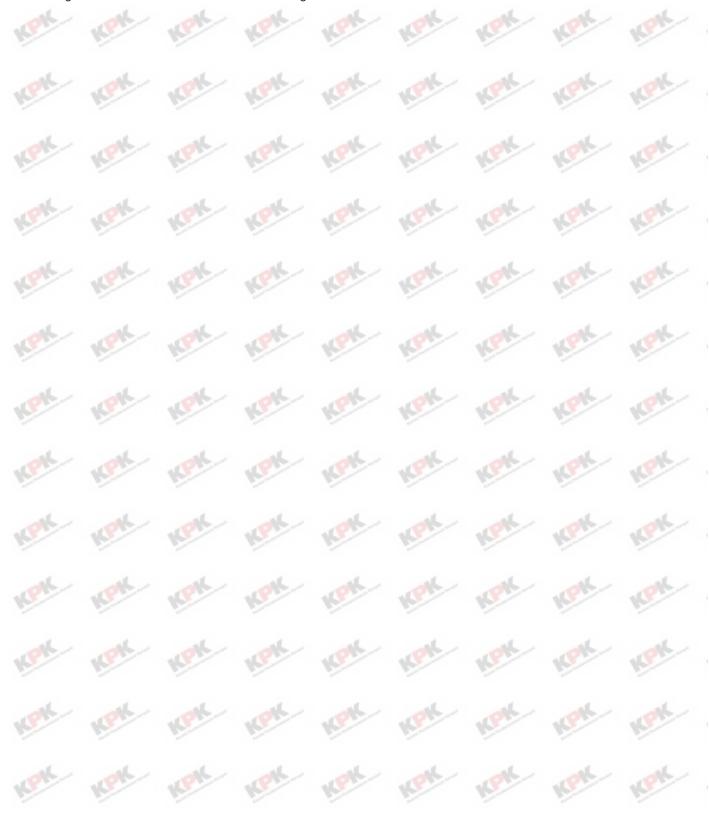
III. HUTANG Rp.

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) 1.092.000.000 Rp.





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

Nama : ETTY APRILYA
 Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 428271

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.565.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
 PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
- Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
 HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
- Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
 HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 585.000.000

- 1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/MINIBUS
 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
- 2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1,5L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	110.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	K. K.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	32.677.528
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kar
Sub Total	Rp.	2.292.677.528
III. HUTANG	Rp.	167.335 <mark>.2</mark> 10
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.125.342.318





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA **UNIT KERJA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD SUWANDI : KEPALA BIDANG 2. Jabatan

3. NHK : 403207

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

- Tanah Seluas 250 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 100,000,000
- Tanah Seluas 527 m2 di KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 527.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/35 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 119.700.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/408 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
- Tanah Seluas 20000 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- Tanah Seluas 25000 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- Tanah Seluas 2000 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- 8. Tanah dan Bangunan Seluas 1560 m2/16 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- Tanah Seluas 600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
- 10. Tanah Seluas 595 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- 11. Tanah Seluas 600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000







- 13. Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp.
- 14. Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp.
 6.000.000
- Tanah Seluas 20000 m² di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- 17. Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- 18. Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp.
- Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp.
 6.000.000
- Tanah Seluas 20000 m2 di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- 21. Tanah Seluas 20000 m² di KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- 22. Tanah Seluas 2472 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- 23. Tanah Seluas 2982 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- 24. Tanah Seluas 2982 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- 25. Tanah Seluas 2955 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- 26. Tanah Seluas 760 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
- 27. Tanah Seluas 675 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
- 28. Tanah Seluas 1200 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

157.000.000

 MOBIL, Toyota Kijang Pick Up Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000







- MOTOR, YAMAHA RXK135 Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOTOR, VESPA 90 CC SPECIAL Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA ASTREA C 100 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.231.896
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kar Kar
Sub Total	Rp.	2.593.431.896
III. HUTANG	Rp.	COK JOH
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.593.431.896

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BERNIE SAPUTRA Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK 416377

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 290.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/35 m2 di PULANG PISAU,

HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/110 m2 di KOTA PALANGKA

RAYA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 220.000.000 Rp.

MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

220,000,000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	
D. SURAT BERHARGA	N.	al.	Rp.	46 - 36
E. KAS DAN SETARA KAS	Kar	Kar	Rp.	36.000.000
F. HARTA LAINNYA			Rp.	10.800.000
Sub Total	KPK	KPK	Rp.	556.800. <mark>0</mark> 00
III. HUTANG			Rp.	90.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	de	al.	Rp.	466.800.000

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.